

STRATEGI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM MENGURANGI KESENJANGAN DIGITAL DI KABUPATEN GUNUNGGIDUL

Muhammad Kharis Abdilah
NPP. 33.0503

Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
Email: m.kharis.abdillah@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ikhbaluddin, S.Kom., M.Si.
Email: ikhbaluddin@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *The digital divide in Gunungkidul Regency exhibits significant spatial and demographical disparities, characterized by a fundamental imbalance between the expansion of physical telecommunication infrastructure and the capacity for community empowerment in rural areas. Despite various infrastructural interventions, certain topographical zones remain isolated from stable connectivity, creating a profound gap in information access and exacerbating existing socio-economic inequalities among the rural population. **Purpose:** To analyze the strategy of the Department of Communication and Informatics of Gunungkidul Regency in reducing the digital divide. **Method:** This qualitative research employs a constructivist paradigm with a descriptive approach. Data collection was conducted comprehensively through in-depth interviews with the Department's apparatus, field technicians, and local communities, complemented by non-participant observation and institutional documentation. Data analysis utilized an interactive thematic approach assisted by NVivo software, integrated with SWOT analysis and the Litmus Test prioritization framework based on the theoretical dimensions of the digital divide. **Result:** The Department has implemented strategic interventions across four primary dimensions: motivational access, material access, skills access, and usage access. However, the execution remains uneven due to persistent geographical barriers and heterogeneous community competencies. The material dimension is heavily constrained by karst topography, while the skills dimension is limited by generational gaps in digital literacy. The prioritization assessment identifies the development of a secure, adaptive, and responsive public information system as the most critical priority, alongside the optimization of infrastructure distribution based on priority rural zones. **Conclusion:** The strategy to mitigate the digital divide necessitates a fundamental paradigm shift towards the integration of an adaptive public information system and inclusive hybrid digital services to effectively reach regions with high access barriers.*

Keywords: *Digital Divide, Digital Literacy, Local Government, Strategic Planning, SWOT Analysis.*

ABSTRAK

Permasalahan: Kesenjangan digital di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan disparitas spasial dan demografis yang signifikan, ditandai oleh ketidakseimbangan mendasar antara perluasan infrastruktur telekomunikasi fisik dan kapasitas pemberdayaan masyarakat di wilayah perdesaan. Meskipun terdapat berbagai intervensi infrastruktur, zona topografis tertentu masih terisolasi dari konektivitas yang stabil, sehingga menciptakan jurang akses informasi yang sangat dalam dan memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi yang ada. **Tujuan:** Menganalisis strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul dalam mengurangi kesenjangan digital. **Metode:** Penelitian kualitatif ini menerapkan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui wawancara mendalam bersama aparatur dinas, teknisi lapangan, dan masyarakat lokal, serta dilengkapi dengan observasi non-partisipan dan dokumentasi institusional. Analisis data menggunakan pendekatan tematik interaktif berbantuan perangkat lunak NVivo, yang diintegrasikan dengan kerangka prioritas analisis SWOT dan Tes Litmus berdasarkan dimensi teoretis kesenjangan digital. **Hasil/Temuan:** Dinas telah menerapkan intervensi strategis pada empat dimensi utama, yaitu akses motivasi, akses material, akses keterampilan, dan akses pemanfaatan. Akan tetapi, pelaksanaannya masih belum merata akibat hambatan geografis yang persisten dan kompetensi masyarakat yang heterogen. Dimensi material sangat dibatasi oleh topografi karst, sementara dimensi keterampilan dibatasi oleh kesenjangan antargenerasi dalam literasi digital. Penilaian prioritas mengidentifikasi pengembangan sistem informasi publik yang aman, adaptif, dan responsif sebagai prioritas paling kritis, bersisian dengan optimalisasi pemerataan infrastruktur berdasarkan zona perdesaan prioritas. **Kesimpulan:** Strategi untuk mengurangi kesenjangan digital membutuhkan pergeseran paradigma yang mendasar menuju integrasi sistem informasi publik yang adaptif dan layanan digital hibrida yang inklusif agar secara efektif dapat menjangkau wilayah dengan hambatan akses yang sangat tinggi.

Kata Kunci: Analisis SWOT, Kesenjangan Digital, Literasi Digital, Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transformasi teknologi informasi dan komunikasi pada abad ke-21 telah memicu pergeseran paradigma berskala global dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Fenomena global menunjukkan bahwa adopsi teknologi tidak lagi berstatus sebagai instrumen pelengkap administratif, melainkan telah bertransformasi menjadi fondasi krusial bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan inklusif (Erikha & Hoesein, 2025). Di tingkat internasional, integrasi sistem informasi dalam pelayanan publik bertujuan untuk memangkas hambatan birokrasi dan mendekatkan negara dengan warga negaranya (Ikhbaluddin, 2020). Meskipun demikian, akselerasi digitalisasi ini menghadirkan sebuah residu sosiologis yang kompleks berupa fenomena kesenjangan digital (Vivi Isri Undayah et al., 2025). Kesenjangan digital merupakan manifestasi ketidaksetaraan akses, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi yang kerap kali mendiskriminasi kelompok masyarakat marjinal dan wilayah pedesaan yang terisolasi secara geografis. Kesenjangan ini tidak sekadar berdimensi teknologis, melainkan merupakan perpanjangan dari ketimpangan sosial dan ekonomi yang telah mengakar dalam struktur masyarakat modern (Haniko et al., 2023).

Pada konteks nasional, Pemerintah Republik Indonesia telah meletakkan landasan yuridis dan operasional yang kokoh melalui arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mempercepat integrasi layanan publik secara nasional (van Deursen & van Dijk, 2015). Visi besar negara dalam mendorong ekosistem digital mensyaratkan kolaborasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan tata kelola yang inklusif (Juanda & Izzulhaq, 2023). Namun, implementasi kebijakan transformasi digital nasional sering kali terbentur oleh realitas asimetris di tingkat lokal. Keterbatasan infrastruktur, minimnya literasi digital aparatur, serta resistensi kultural masyarakat birokrasi menjadi residu yang memperlambat laju tata kelola elektronik di berbagai daerah (Jayanthi & Dinaseviani, 2022). Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak cukup hanya direkayasa melalui penyediaan perangkat keras atau jaringan pita lebar semata, melainkan memerlukan intervensi kebijakan publik yang masif untuk mendiseminasikan layanan agar dapat diadaptasi oleh masyarakat. Dinamika ini menempatkan pemerintah daerah pada titik ekuilibrium yang krusial untuk menerjemahkan mandat nasional ke dalam inovasi tata kelola yang kompatibel dengan karakteristik demografis dan geografis lokal (Fedrick et al., 2024).

Kabupaten Gunungkidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan representasi lokus penelitian yang secara empiris menampilkan kompleksitas fenomena kesenjangan digital (van Deursen & van Dijk, 2018). Secara topografis, wilayah ini didominasi oleh perbukitan struktural Baturagung di zona utara dan bentang alam karst Pegunungan Seribu di zona selatan. Kondisi geologis ekstrem ini menciptakan rintangan fisik yang masif bagi rambatan gelombang radio dan transmisi sinyal, yang bermuara pada proliferasi titik-titik ketiadaan sinyal di pedesaan. Ketimpangan spasial ini diperparah oleh disparitas pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang secara historis lebih terkonsentrasi di zona tengah atau pusat kota pemerintahan (van Deursen & van Dijk, 2013). Data empiris memperlihatkan bahwa rasio ketersediaan infrastruktur di wilayah terpencil dengan populasi yang renggang masih sangat minim akibat mahalnya biaya investasi jaringan serat optik. Konstelasi ini pada akhirnya mengeksklusi sebagian besar masyarakat pedesaan dari akses informasi elektronik dan peluang ekonomi digital yang tengah berkembang pesat.

Secara teoretis, tata kelola pemerintahan sejatinya bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan jasa publik dan layanan sipil secara berkeadilan, tanpa memandang segregasi spasial. Ilmu pemerintahan kontemporer menekankan bahwa pemerintah wajib menyediakan layanan yang responsif dan memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri serta berdaya saing. Dalam bingkai desentralisasi, penyelenggaraan pemerintahan daerah dituntut untuk mengkreasi strategi pembangunan yang peka terhadap entitas lokal. Lebih lanjut, kerangka teori kesenjangan digital secara komprehensif menguraikan bahwa disparitas teknologi harus didiagnosis melalui empat dimensi yang saling bertingkat, yakni motivasi, materi, keterampilan, dan pemanfaatan. Kesenjangan pada tahap akses material akan secara akumulatif mendegradasi peluang masyarakat untuk mengekspansi keterampilan digital mereka, yang pada gilirannya melumpuhkan kemampuan mereka untuk memanifestasikan teknologi ke dalam utilitas yang produktif (Susanti et al., 2023).

Kondisi ideal dari sebuah tata kelola digital di tingkat daerah mensyaratkan adanya ekuilibrium antara akselerasi pembangunan infrastruktur fisik dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah melalui instansi teknis yang relevan semestinya mampu mendesain strategi yang secara simultan mengikis hambatan akses material sekaligus menyuntikkan literasi digital secara berkelanjutan kepada masyarakat akar rumput. Dalam lanskap ideal ini, masyarakat tidak sekadar berstatus sebagai konsumen pasif atas ketersediaan konektivitas nirkabel, melainkan bertransformasi menjadi entitas proaktif yang mengeksplorasi teknologi untuk menunjang sektor agrikultur, meretas pasar digital bagi usaha mikro, dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan pelayanan publik.

Transformasi holistik ini bertumpu pada kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam memetakan lingkungan strategis dan meracik intervensi kebijakan yang berdimensi jangka panjang (Susilawati et al., 2023).

Kondisi aktual di Kabupaten Gunungkidul merefleksikan disparitas yang substansial dari kondisi ideal tersebut. Meskipun Dinas Komunikasi dan Informatika telah merentangkan jaringan serat optik ke berbagai kalurahan dan menginstalasi sarana internet nirkabel publik, dampak nyata dari intervensi tersebut belum terdistribusi secara ekuivalen. Kualitas stabilitas jaringan masih sangat rentan terhadap fluktuasi cuaca ekstrem dan anomali teknis di wilayah perbukitan. Di samping itu, eskalasi penetrasi perangkat seluler di kalangan warga ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan literasi digital kritis. Keterampilan operasional dasar mulai diadopsi secara luas, namun kemampuan menyaring informasi dari ancaman kejahatan siber serta pemanfaatan teknologi untuk produktivitas ekonomi masih tersentralisasi pada generasi muda dan populasi perkotaan. Dinamika ini memvalidasi premis bahwa intervensi teknis semata akan mengalami kemandekan manakala tidak dikonvergensi dengan rekayasa sosial dan pendampingan literasi yang intensif.

Urgensi untuk mengintervensi masalah ini bersumber pada tuntutan strategis agar ketertinggalan teknologi tidak bermutasi menjadi kemiskinan struktural absolut di wilayah pedesaan Gunungkidul. Kesenjangan digital yang dibiarkan berlarut-larut akan mendelegitimasi prinsip keadilan sosial dan menganulir hak fundamental warga negara atas akses informasi. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika dituntut untuk tidak sebatas merumuskan cetak biru infrastruktur, tetapi wajib merancang kerangka kerja strategis yang mampu membongkar seluruh lapisan hambatan kultural, geografis, dan kompetensi teknis. Identifikasi prioritas strategi melalui perangkat analisis manajemen yang kredibel menjadi sebuah kemutlakan empiris guna memproyeksikan efisiensi alokasi anggaran dan optimalisasi sumber daya aparatur. Berpijak pada rasionalisasi akademik dan fenomena sosiologis tersebut, kajian komprehensif mengenai strategi instansi teknis di Kabupaten Gunungkidul menempati posisi yang sangat urgen untuk diteliti lebih mendalam.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Kajian ilmiah mengenai eksistensi kesenjangan digital telah melahirkan berbagai spektrum analisis yang komprehensif di level global. Penelitian bertaraf internasional umumnya menitikberatkan investigasi pada korelasi antara kapital sosial masyarakat dengan eskalasi pemanfaatan teknologi di daerah periferi. Disparitas digital di kawasan dunia berkembang sering kali dipandang sebagai produk turunan dari absennya keadilan infrastruktur lintas batas yang secara sistematis memarginalkan entitas pedesaan. Di samping itu, studi makro membuktikan bahwa daerah pedesaan membutuhkan rekayasa sosial yang berkesinambungan dan tidak sekadar bersandar pada injeksi perangkat keras untuk mencapai derajat literasi digital yang fungsional. Kesimpulan dari agregasi riset internasional ini menempatkan elemen kultural dan struktural sebagai episentrum dari keberhasilan inklusi digital secara universal.

Sebaliknya, diskursus akademik di tingkat nasional diwarnai oleh tendensi penelitian yang sangat berpusat pada penanggulangan teknis berbasis infrastruktur dan pelatihan literasi temporal. Kajian terdahulu di Indonesia sering mendiagnosis efektivitas program perluasan infrastruktur internet di daerah pelosok sebagai variabel tunggal yang merepresentasikan kesuksesan kebijakan pemerintah. Terdapat pula berbagai riset yang memusatkan perhatian pada skema pembentukan desa cerdas melalui intervensi fasilitasi perangkat nirkabel publik untuk menopang partisipasi masyarakat. Narasi nasional yang terbangun sebagian besar berkuat pada evaluasi pragmatis atas kuantitas program pelatihan dan

peningkatan konektivitas, tanpa secara komprehensif mengupas lapis-lapis dimensi manajerial yang berkelindan di dalamnya.

Inkonsistensi literatur mulai mengemuka tatkala mengonfrontasikan pendekatan teknosentris nasional dengan kompleksitas diagnosis bertingkat yang diamanatkan oleh teori makro internasional. Keterbatasan utama dari riset-riset terdahulu bermuara pada minimnya penelusuran terhadap arsitektur strategis dari kelembagaan pemerintah daerah yang berperan sebagai katalisator kebijakan. Sebagian besar literatur gagal membedah secara integratif bagaimana sebuah lembaga memformulasikan strategi komunikasi publik dan kebijakan digital dengan bersandar pada konstelasi matriks internal maupun ancaman lingkungan eksternal yang membayangi operasionalisasinya. Di samping itu, penelitian sebelumnya belum mengeksplorasi alat pengujian manajerial yang kredibel untuk mengeliminasi bias dalam menentukan prioritas kebijakan di lapangan.

Merespons kesenjangan dan anomali teoretis tersebut, posisi penelitian ini hadir untuk mengonstruksi paradigma analisis yang sepenuhnya berorientasi pada bedah kelembagaan strategis. Kajian ini secara eksklusif berupaya mengisi ruang kosong akademik dengan mengkombinasikan evaluasi dimensi digital secara sosiologis dan perangkat uji presisi perumusan strategis manajemen. Penelitian ini secara spesifik tidak lagi memperdebatkan efikasi infrastruktur semata, melainkan mengkalibrasi strategi birokrasi pemerintahan daerah dalam menjawab problematika kesenjangan digital di kawasan berhambatan geospasial tinggi.

1.3 Urgensi Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini menduduki posisi krusial dalam mengakselerasi diskursus akademik di ranah ilmu pemerintahan kontemporer dan studi teknologi birokrasi. Kajian ini menawarkan integrasi yang komprehensif antara teori kesenjangan digital yang menyoal dimensi sosiologis dengan pendekatan rekayasa manajemen strategis dalam organisasi sektor publik. Elaborasi konseptual ini melahirkan perspektif baru bahwa evolusi literasi digital tidak bergerak dalam ruang hampa, melainkan dikendalikan secara mutlak oleh orkestrasi kelembagaan pemerintah daerah yang meramu intervensi secara terukur. Sintesis ini meletakkan fondasi teoretis bahwa disparitas digital sejatinya merupakan manifestasi dari efektivitas perencanaan strategis dan resiliensi kapasitas aparatur dalam merespons turbulensi disrupsi inovasi.

Pada tatanan praktis, ekskavasi mendalam terhadap anatomi operasional lembaga pemerintah lokal menghadirkan urgensi yang tidak dapat ditawar untuk menjamin keadilan akses teknologi bagi masyarakat akar rumput. Intervensi yang dihasilkan dari penelitian ini dirancang untuk mencegah potensi disorientasi pengalokasian anggaran yang sering kali terjebak pada pengadaan fisik tanpa disertai pemberdayaan pengguna. Urgensi praktisnya bermuara pada upaya menghadirkan justifikasi yang empiris bagi instansi terkait agar mampu menata ulang skala prioritas penanganan area nirkoneksi dan optimalisasi literasi komunitas. Analisis kritis yang dilakukan terhadap pemanfaatan teknologi di ruang publik memberikan pencerahan tentang signifikansi merawat ekosistem digital agar mampu menstimulasi produktivitas usaha mikro masyarakat desa (Ardieansyah et al., 2020).

Dari dimensi kebijakan, produk penelitian ini menginjeksi urgensi yang fundamental bagi penyempurnaan regulasi dan cetak biru penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di level daerah. Pengujian perangkat strategis dalam kajian ini mendesak pemerintah untuk merekonstruksi desain sistem informasi yang tidak eksklusif, melainkan yang bersifat hibrida dan adaptif terhadap anomali geografis wilayah administratif. Hasil identifikasi empiris ini memaksa perancang kebijakan untuk segera meninggalkan pendekatan generik dan mengadopsi formulasi kebijakan asimetris yang

berpihak pada kantong-kantong geospasial dengan kerentanan akses tertinggi demi menegakkan mandat pelayanan publik yang berkeadilan (Fahlevvi et al., 2025).

1.4 Penelitian Terdahulu

Kajian ilmiah mengenai eksistensi kesenjangan digital telah ditelaah dari berbagai spektrum komprehensif, salah satunya sebagai penguatan pada kajian bertaraf internasional. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu bertaraf internasional yang menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini:

1. Yang et al. (2024) mengekskavasi ketidaksetaraan teknologi di kawasan Selatan Global dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kesenjangan digital diperparah oleh ketidakadilan akses material dan rendahnya penguasaan literasi kritis pada komunitas marjinal.
2. van Deursen dan van Dijk (2019) mengkaji evolusi kesenjangan digital dengan memfokuskan pada aspek akses material. Penelitian ini menegaskan bahwa kesenjangan digital tingkat pertama telah bergeser dari sekadar ketersediaan akses fisik menuju ketidaksetaraan material, yang secara spesifik mencakup keragaman perangkat, periferal pendukung, dan biaya pemeliharaan.
3. Ansell et al. (2023) meneliti tentang tantangan tata kelola publik dalam menghadapi turbulensi krisis dan kesenjangan melalui konseptualisasi berjenjang. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa esensi kesenjangan telah bermigrasi pada kualitas dan durabilitas perangkat serta konektivitas jaringan material yang membutuhkan respons tata kelola yang tangguh.
4. Alhosani dan Alhashmi (2024) menganalisis peluang dan tantangan inovasi teknologi di sektor pemerintahan melalui analisis kuantitatif longitudinal. Penelitian ini membuktikan bahwa perluasan infrastruktur internet pedesaan tidak serta-merta menjamin perbaikan pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat, melainkan membutuhkan keberlanjutan rekayasa sosial dari pemerintah.
5. Carstensen et al. (2023) mengkaji tata kelola solusi digital dari sudut pandang struktur sosial. Menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini membuktikan bahwa akumulasi kapital sosial sangat determinan dalam memfasilitasi transisi masyarakat dari tahapan akses menuju literasi informasi yang produktif.
6. Zuiderwijk et al. (2021) menelaah implikasi penggunaan teknologi dalam tata kelola publik melalui pendekatan studi literatur yang sistematis. Penelitian ini turut memperkuat argumentasi sebelumnya dengan menegaskan bahwa disparitas teknologi merupakan turunan linier dari struktur ketimpangan kelas sosial ekonomi yang telah mengakar di masyarakat.
7. Agostino et al. (2022) menjelaskan digitalisasi dan akuntabilitas pada pelayanan publik melalui penelitian kualitatif deskriptif. Hasil kajiannya memaparkan bahwa inisiasi pemerataan konektivitas internet oleh dinas atau otoritas daerah berkontribusi sentral dalam meningkatkan derajat literasi warga di kawasan desa yang tertinggal.
8. Dos Passos et al. (2023) meneliti kapasitas negara di tingkat lokal dan profesionalisasi birokrasi yang berdampak pada pembangunan kawasan. Penelitian ini memvalidasi eksperimentasi intervensi lokal dengan menemukan bahwa fasilitasi perangkat publik dan pelatihan dasar secara signifikan memperkuat inklusi tatanan ekonomi masyarakat pedesaan.

Sebagai penguatan kerangka analisis pada level domestik, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu bertaraf nasional yang menyoroti evaluasi pragmatis intervensi lembaga pemerintahan dalam mengakselerasi inklusi digital:

1. Susilawati, Yanti, dan Erni (2023) melalui studinya mengenai transformasi digital pemerintah menemukan bahwa implementasi tata kelola pemerintahan elektronik di Indonesia masih terhambat oleh regulasi yang belum memadai, minimnya integrasi data, kesenjangan infrastruktur telekomunikasi antarwilayah, serta keterbatasan kompetensi sumber daya manusia.
2. Jayanthi dan Dinaseviani (2022) mengkaji kondisi kesenjangan digital di Indonesia selama masa pandemi Covid-19 menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun terjadi percepatan akses internet, peningkatan tersebut belum disertai dengan kesiapan kemampuan digital masyarakat, sehingga diperlukan solusi strategi komunikasi yang lebih partisipatif.
3. Fedrick et al. (2024) meneliti tentang peningkatan kehidupan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui literasi digital. Temuan penelitian ini menekankan bahwa investasi dalam literasi digital bukan hanya mendukung kemajuan usaha secara individu, tetapi juga memberikan dampak positif pada perekonomian secara keseluruhan dengan mengurangi kesenjangan digital di masyarakat.
4. Susanti et al. (2023) dalam penelitiannya mengenai upaya mengurangi kesenjangan digital pada penerapan desa cerdas, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan ketimpangan teknologi di desa dapat dilakukan dengan program pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat serta pembentukan sistem informasi desa oleh pemerintah desa.
5. Erikha dan Hoesein (2025) membahas strategi pencegahan kebocoran data pribadi di Indonesia dalam perspektif hukum dan kebijakan. Penelitian ini menyoroti perlunya kolaborasi antarsektor untuk memperkuat regulasi, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memperkuat infrastruktur keamanan siber sebagai bagian dari strategi perlindungan data yang komprehensif.
6. Vivi Isri Undayah et al. (2025) menekankan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran strategis dalam membangun citra positif instansi daerah melalui strategi komunikasi publik, manajemen informasi, dan pendekatan persuasif untuk membangun kepercayaan masyarakat di era digital.

Sebagai penguatan relevansi terhadap kajian ilmu pemerintahan, penelitian ini juga dilandasi oleh beberapa literatur dari jurnal dosen dan civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri:

1. Ikhbaluddin (2020) dalam studinya menekankan bahwa strategi pemerintah daerah dalam menerapkan teknologi informasi pemerintahan mutlak memerlukan regulasi komprehensif dan integrasi antar organisasi perangkat daerah guna meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik.
2. Setiawan et al. (2025) melalui kajiannya mengonfirmasi bahwa sinkronisasi antara penyediaan infrastruktur desa, integrasi sistem informasi geospasial, dan bimbingan literasi merupakan kunci resiliensi masyarakat terhadap dinamika digital.
3. Rabil et al. (2025) menyatakan bahwa resiliensi birokrasi dalam menjaga stabilitas pelayanan pemerintahan elektronik membutuhkan integrasi koordinasi kelembagaan yang vertikal dan solid, serta penerimaan sistem informasi oleh pengguna sangat ditentukan oleh kemudahan penggunaannya.
4. Ardiansyah et al. (2020) menunjukkan bahwa perumusan strategi diseminasi publik secara intensif mutlak dibutuhkan demi meningkatkan kepercayaan warga, dengan melibatkan peranan kelembagaan formal maupun informal masyarakat dalam tata kelola elektronik.

5. Fahlevvi, Kusuma, dan Anugerah (2025) mengkaji integrasi teknologi digital dalam pengawasan internal pemerintahan daerah, yang menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, literasi digital pegawai, serta strategi manajemen perubahan untuk mengatasi resistensi birokrasi.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memproyeksikan kebaruan ilmiah pada ruang lingkup objek, penetapan lokasi geografis, sintesis teoretis, serta pendekatan metodologis yang dieksekusi secara ketat. Secara objektif, kebaruan objek penelitian ini termanifestasi pada konvergensi analisis anatomi kelembagaan pemerintah daerah yang difokuskan secara spesifik untuk meretas residu transformasi pelayanan elektronik. Penelitian ini membongkar kotak hitam birokrasi dalam menyusun arsitektur strategi pemerataan digital yang selama ini sering dikesampingkan dalam literatur teknologi publik.

Dari aspek lokasi, penetapan bentang alam karst menghadirkan kebaruan empiris sebagai laboratorium sosiologis. Topografi yang secara ekstrem membatasi rambatan gelombang konektivitas secara inheren menguji kapasitas maksimal intervensi aparatur negara di wilayah periferi. Lokus ini menyajikan tantangan geospasial yang sangat langka dan berbeda secara diametral dengan ekosistem tata kelola perkotaan yang biasanya mendominasi kajian serupa.

Kebaruan metode diartikulasikan melalui modifikasi instrumen penelitian kualitatif yang mengisolasi teknik penggalian data secara absolut pada dialektika wawancara mendalam dengan pelaku kebijakan. Rekayasa pengumpulan data ini disilangkan dengan pemanfaatan kecerdasan tematik komputasional untuk memetakan hierarki permasalahan secara objektif, serta ditransformasikan melalui perangkat taktis manajerial untuk menyaring tingkat urgensi kebijakan. Sementara itu, kebaruan teoretis dikristalisasi melalui asimilasi konseptual antara determinisme dimensi sosiologis dengan doktrin perencanaan komprehensif birokrasi, yang menghasilkan temuan pionir mengenai urgensi pengembangan layanan informasi berbasis hibrida di daerah dengan hambatan geografis.

1.6 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul dalam mengurangi kesenjangan digital.

II. METODE

Penelitian ini merancang bangun kerangka desain penelitian kualitatif yang dilandasi oleh paradigma konstruktivisme demi mengekskavasi makna di balik kebijakan tata kelola elektronik. Pendekatan deskriptif dipilih secara sengaja untuk merekonstruksi dan merasionalkan realitas empiris tanpa melakukan manipulasi variabel analitis. Pendekatan ini memfasilitasi penggambaran fenomena secara faktual dan sistematis terkait intervensi kelembagaan dalam memperluas akses teknologi informasi di ruang publik.

Lokus penelitian dikonsentrasikan secara eksklusif di wilayah administratif Kabupaten Gunungkidul. Titik pusat penyelidikan memprioritaskan markas institusi pemerintah daerah yang mengoordinasikan urusan informatika, serta sebaran komunitas akar rumput di tingkat padukuhan yang bersinggungan langsung dengan rintangan topografis ekstrem. Penentuan lokasi ini dijustifikasi oleh tingginya disparitas ketersediaan jaringan telekomunikasi akibat anomali bentang alam karst yang mendominasi wilayah tersebut.

Subjek informan dipetakan secara terukur menggunakan metode penyaringan yang mempertimbangkan relevansi dan tingkat pengetahuan terhadap fenomena yang diteliti. Penjaringan ini

melibatkan para arsitek kebijakan di eselon struktural dinas, personel teknis lapangan yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perangkat keras, serta representasi masyarakat sipil yang menjadi target penerima manfaat literasi. Teknik perluasan referensi silang turut digunakan untuk melengkapi saturasi data dari berbagai sudut pandang pemangku kepentingan.

Pengumpulan data lapangan diselenggarakan secara mutlak melalui pelaksanaan wawancara mendalam yang bersifat semi-terstruktur. Keputusan strategis untuk mengandalkan wawancara sebagai instrumen utama dirancang untuk menyerap esensi dialektika aktor secara murni. Proses wawancara ini didampingi oleh observasi partisipatif di lingkungan kerja aparatur dan wilayah masyarakat penerima manfaat, serta telaah dokumen resmi pemerintah yang menguatkan kerangka legislasi kebijakan digital daerah.

Proses pembedahan data mengaplikasikan metodologi analisis interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan. Alur analitis ini diinjeksi dengan kapabilitas perangkat lunak komputasional untuk mengkategorisasi kluster tematik dan menyajikan komparasi linguistik visual yang mempertegas hierarki permasalahan secara objektif. Interpretasi akhir dari temuan sosiologis ini selanjutnya dilebur ke dalam matriks kuadran evaluasi strategis guna menghasilkan preskripsi manajerial. Pengujian kredibilitas keabsahan data dijamin melalui pelaksanaan konfirmasi silang kepada informan untuk menegaskan bahwa seluruh representasi tafsir peneliti sepenuhnya selaras dengan intensi hakiki narasumber di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi pereduksian disparitas teknologi yang diorkestrasi oleh instansi pemerintahan diekskavasi secara mendalam berdasarkan konfigurasi dimensi teoretis. Penjabaran hasil dan pembahasan ini membedah realitas lapangan secara terstruktur dari lapisan fondasi motivasi hingga puncak tangga pemanfaatan teknologi.

3.1 Dimensi Akses Motivasi

Pada fondasi dimensi motivasi, orkestrasi dinas menyoroti urgensi penyebaran literasi yang masif guna menanamkan persepsi fungsional internet di benak publik. Realitas lapangan menegaskan bahwa instrumen sosial kemasyarakatan dikerahkan secara terstruktur untuk memicu ketertarikan warga perdesaan agar tidak terasing dari arus modernisasi tata kelola. Dialektika dengan aparatur memperlihatkan bahwa ketertarikan emosional terhadap peranti keras sejatinya didikte oleh desakan utilitas pragmatis harian masyarakat yang bersentuhan langsung dengan sektor pendidikan maupun transaksi perniagaan. Dinamika ini menyingkap fakta bahwa strategi merakit embrio motivasi telah mengkristal dengan matang di kalangan pelaku usaha skala mikro, kendati penetrasinya masih mengalami stagnasi di demografi generasi lansia yang memandang gawai sebagai entitas yang rumit.

3.2 Dimensi Akses Material

Transisi menuju pijakan dimensi material merefleksikan manifestasi fisik dari strategi pembongkaran isolasi geografis. Institusi memprioritaskan penyebaran jaringan nirkabel di balai-balai padukuhan sebagai ruang interaksi komunal. Namun, arsitektur perbukitan karst secara ekstrem mendelegitimasi ekuivalensi kualitas koneksi, di mana pelemahan rambatan gelombang sangat bergantung pada cuaca dan pasokan listrik. Ketersediaan gawai pada tingkat individu seketika mengalami devaluasi utilitas manakala infrastruktur transmisi data di wilayah geografis rawan tersebut direduksi kualitasnya oleh anomali teknis lapangan. Kesenjangan ini dapat ditinjau melalui representasi kondisi material wilayah yang menopang lalu lintas informasi.

Tabel 1
Data Pendukung Indikator Kualitas dan Kestabilan Jaringan Internet

Indikator Pendukung	Kondisi/Keterangan
Luas Keseluruhan Wilayah Administratif	1.475,147 km ²
Rasio Cakupan Sinyal 4G secara Statistik	100,00%
Distribusi Titik Internet Kalurahan Teralokasi	144 Titik
Alokasi Titik Akses Internet Umum	7 Titik
Alokasi Titik Akses pada Fasilitas Pasar	9 Titik

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2026.

3.3 Dimensi Akses Keterampilan

Peningkatan kapasitas kognitif masyarakat dikalibrasi pada dimensi keterampilan yang menuntut transformasi aparatur birokrasi menjadi fasilitator edukasi literasi. Strategi penguatan kompetensi ditekankan pada ketahanan masyarakat dalam menyaring rekayasa kebohongan informasi yang membanjiri peranti genggam penduduk lokal. Instansi pemerintah memperlihatkan atensi serius terhadap maraknya infiltrasi patologi sosial berbasis siber yang menyasar demografi dengan resistensi literasi yang rentan. Kapabilitas mengoperasikan aplikasi administratif birokrasi masih menempati posisi kognitif sekunder dibandingkan dengan kebutuhan mendesak untuk membentuk kesadaran keamanan digital. Literasi kritis komunal ini mutlak ditransformasikan secara merata sebelum masyarakat akar rumput diizinkan bermigrasi secara penuh ke dalam ekosistem perniagaan daring yang kompleks.

3.4 Dimensi Akses Pemanfaatan

Puncak piramida pemanfaatan teknologi diurai pada dimensi akses penggunaan yang mengevaluasi esensi dari seluruh rangkaian strategi inklusi. Frekuensi interaksi antarmuka layar oleh lapisan masyarakat usia produktif secara agresif diinjeksikan pada ekspansi komersial agrikultur komunal dan percepatan layanan administrasi fundamental harian. Penetrasi utilitas teknologi telah bersarang kuat pada sektor-sektor perekonomian riil pasar tradisional. Walau demikian, kedalaman temuan memproyeksikan bahwa trajektori pelibatan masyarakat pada platform aduan formal kenegaraan masih berjalan secara situasional dan terfragmentasi.

Tabel 2
Data Pendukung Indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Digital Pemerintah

Indikator Partisipasi Publik	Kondisi/Keterangan
Akumulasi Pengguna Aktif Portal Utama	4,1 Ribu Pengguna
Akumulasi Tampilan Seluruh Halaman Portal	23 Ribu Tampilan
Mayoritas Medium Interaksi Fungsional	Portal Pesan Singkat dan Media Sosial Promosi
Mayoritas Aplikasi Tata Kelola Teraplikasi	Administrasi Edukasi dan Kependudukan Dasar

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2026.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sintesis holistik dari agregasi penelitian ini mengkristalkan kesimpulan substansial bahwa konfigurasi strategi institusi pemerintah level lokal dalam mengeliminasi jurang teknologi telah terdistribusi pada lanskap motivasi kultural, ketersediaan material, kecakapan kognitif, dan intensitas utilitas. Identifikasi diagnostik membuktikan bahwa penetrasi infrastruktur pita lebar di pedesaan belum berkorelasi linier dengan ekskalasi literasi kritis masyarakat dalam mengelola kerentanan

informasi siber. Disparitas peralatan keras di lapangan secara alamiah selalu bermutasi menuju defisit kompetensi produktif apabila absen dari sokongan rekayasa pendampingan sosial yang terstruktur.

Komparasi analitis memperlihatkan bahwa manuver pemenuhan konektivitas fisik yang menjadi instrumen utama regulasi pusat ternyata mengalami turbulensi empiris saat direplikasi di kawasan topografis yang kompleks. Eksekusi perangkat penguji strategis mendesakkan perancangan sistem pelayanan komunikasi yang responsif dan inklusif sebagai pilar eksistensi terdepan. Resolusi ini memperkuat argumen teoretis bahwa organisasi birokrasi dituntut untuk merombak desain tata kelola digital konvensional menjadi arsitektur kelembagaan yang memiliki kelenturan maksimal dalam merespons hambatan jarak dan keterbatasan kognitif antar-generasi. Pilar kontribusi keilmuan yang dipancarkan oleh kajian ini bersemayam pada penciptaan model evaluasi kebijakan yang mengintegrasikan determinisme sosiologi dengan matriks manajemen pemerintahan.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama, penelitian ini menyingkap realitas empiris bahwa strategi pengurangan kesenjangan digital tidak semata-mata bertumpu pada intervensi penyediaan infrastruktur fisik, melainkan sangat digerakkan oleh rekayasa sosial di tingkat akar rumput. Dinas Komunikasi dan Informatika secara proaktif memanfaatkan institusi kemasyarakatan lokal, yakni Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), tidak sekadar sebagai objek penerima manfaat literasi, melainkan sebagai subjek aktif dalam ekosistem digital daerah. KIM difungsikan secara strategis sebagai instrumen analitik *bottom-up* untuk memetakan titik-titik area *blank spot* secara presisi serta menjadi agen diseminasi informasi penangkal disinformasi di pedesaan. Temuan ini memberikan perspektif keilmuan yang baru bahwa efektivitas tata kelola teknologi di wilayah dengan anomali topografi ekstrem mutlak memerlukan sinkronisasi antara pendekatan teknosentris dengan pendekatan sosiokultural yang mengakar pada kearifan lokal.

Temuan menarik lainnya bermuara pada dimensi pemanfaatan (*usage access*), di mana transisi adopsi teknologi oleh masyarakat perdesaan ternyata mengalami akselerasi yang jauh lebih masif ketika diintegrasikan dengan utilitas ekonomi riil. Data observasi lapangan membuktikan bahwa fasilitas ruang internet nirkabel publik secara intensif dieksploitasi oleh kelompok usia produktif untuk menggerakkan inovasi *Internet of Things* (IoT) pada sektor agrikultur komunal serta memperluas penetrasi pasar bagi produk usaha mikro. Pemanfaatan pragmatis ini nyatanya jauh melampaui tingkat partisipasi masyarakat pada kanal-kanal pengaduan formal pemerintahan. Realitas ini mengonfirmasi sebuah tesis penting bahwa masyarakat di daerah periferi akan secara mandiri dan sukarela melintasi jurang kesenjangan digital apabila intervensi teknologi yang dihadirkan oleh negara menawarkan resolusi langsung terhadap kebutuhan peningkatan taraf hidup dan produktivitas komersial mereka.

Lebih lanjut, ekskavasi data secara mendalam memperlihatkan anomali berupa asimetri kecakapan digital antargenerasi yang menciptakan kantong-kantong isolasi baru di tengah masifnya ketersediaan infrastruktur. Eskalasi ketersediaan perangkat keras pintar dan perluasan jaringan serat optik ke desa-desa terbukti gagal dikonversi menjadi produktivitas oleh demografi penduduk lanjut usia, yang secara empiris masih terkungkung dalam pola komunikasi seluler konvensional. Eksistensi kelompok rentan teknologi ini mempertegas rasionalisasi bahwa strategi pelibatan masyarakat dalam ekosistem pelayanan elektronik daerah tidak dapat dihomogenisasi. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk tidak serta-merta menghapus loket pelayanan manual, melainkan wajib merawat skema layanan administratif hibrida yang mengawinkan otomasi digital dengan pendampingan aparatur secara fisik guna memastikan asas inklusivitas tetap terpelihara di seluruh lapisan demografis tanpa diskriminasi.

IV. KESIMPULAN

Strategi operasional yang telah dieksekusi secara masif oleh instansi pemerintah daerah dalam menanggulangi segregasi teknologi mencakup perluasan sebaran instalasi nirkabel pedesaan, injeksi edukasi literasi via komunitas sosial, serta fasilitasi konektivitas berorientasi pada pemberdayaan perekonomian. Meskipun demikian, dinamika implementasi kebijakan ini tetap dihadapkan pada ketidakseimbangan daya ungkit akibat limitasi kuantitas aparatur teknis internal yang tidak berbanding lurus dengan luasnya bentang isolasi material dan topografis. Formulasi kebijakan paling esensial yang direkomendasikan secara definitif untuk mengerdilkan kesenjangan digital di masa depan bertumpu pada pengembangan sistem pelayanan publik elektronik yang bersifat hibrida dan memiliki resiliensi tinggi terhadap rintangan geografis. Strategi mutlak ini menuntut integrasi kolaboratif lintas entitas sektoral guna menjamin pemerataan kapasitas kritis di akar rumput.

Keterbatasan Penelitian Restriksi fundamental yang mereduksi optimalisasi penelitian ini terletak pada limitasi rentang geografis yang tidak seluruhnya merepresentasikan populasi komunitas yang terestrem terisolir di wilayah pedalaman selatan. Ketergantungan absolut pada teknik interpretasi wawancara verbal berpotensi menghadirkan bias objektivitas atas kondisi teknis dan kapabilitas aktual yang terjadi pada fasilitas infrastruktur telekomunikasi desa secara riil di lapangan.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*) Prospek pembedahan akademik di masa depan diinstruksikan untuk mengakselerasi rancang bangun metodologi eksperimentasi yang spesifik untuk menakar efikasi pendampingan literasi siber bagi kelompok masyarakat lanjut usia yang terbukti resisten terhadap teknologi. Evaluasi akademis lanjutan juga perlu dikonsentrasikan untuk mengaudit korelasi matematis antara investasi pembangunan jaringan nirkabel publik terhadap peningkatan eksponensial indeks kemandirian kewirausahaan digital di wilayah berpendapatan terendah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ikhbaluddin, S.Kom, M.Si. selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini. Peneliti menyematkan apresiasi akademik setinggi-tingginya kepada jajaran aparatur sipil negara di lingkungan instansi komunikasi dan informatika daerah atas transparansi manajerial selama proses dialektika penelitian. Penghargaan mendalam turut ditujukan kepada elemen masyarakat lokal yang secara sukarela menyumbangkan prespektif empiris krusial demi memperkokoh ketajaman argumentasi sosiologis dalam penyusunan manuskrip ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agostino, D., Saliterer, I., & Steccolini, I. (2022). Digitalization, accounting and accountability: A literature review and reflections on future research in public services. *Financial Accountability and Management*, 38(2), 152–176. <https://doi.org/10.1111/faam.12301>
- Alhosani, K., & Alhashmi, S. M. (2024). Opportunities, challenges, and benefits of AI innovation in government services: a review. *Discover Artificial Intelligence*, 4(1). <https://doi.org/10.1007/s44163-024-00111-w>
- Ansell, C., Sørensen, E., & Torfing, J. (2023). Public administration and politics meet turbulence: The search for robust governance responses. *Public Administration*, 101(1), 3–22. <https://doi.org/10.1111/padm.12874>
- Ardieansyah, A., Meiyenti, I., Mulya Nalien, E., & Sentosa, I. (2020). The Role of tungku tigo sajarangan in the community development planning of minangkabau, Indonesia. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 12(2), 141–155.

<https://doi.org/10.33701/jtp.v12i2.881>

- Carstensen, M. B., Sørensen, E., & Torfing, J. (2023). Why we need bricoleurs to foster robust governance solutions in turbulent times. *Public Administration*, 101(1), 36–52. <https://doi.org/10.1111/padm.12857>
- Dos Passos, P. M., Dib, B. B., Júnior, E. V. M., de Oliveira, B. G., & Petean, G. H. (2023). Local state capacity: an analysis of bureaucracy' professionalization level and its efection on development. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, 17(1). <https://doi.org/10.24857/RGSA.V17N1-018>
- Erikha, A., & Hoesein, Z. A. (2025). Strategi Pencegahan Kebocoran Data Pribadi melalui Peran Kominfo dan Gerakan Siberkreasi dalam Edukasi Digital. *Jurnal Retentum*, 5(1), 48–64. <https://jurnal.universitadarmaagung.ac.id/retentum/article/view/5272>
- Fahlevvi, M. R., Kusuma, K. A. P. I., & Anugerah, M. W. (2025). Integrasi teknologi digital dalam pengawasan internal inspektorat daerah kabupaten gianyar. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(2), 236–249. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i2.687>
- Fedrick, Louis Saragih, J., Jihan Faradilla, A., Alhaq Nasution, R., Fatmi Adelina Tafonao, D., Pitaloka, D., Amelia, B., & Dongoran, D. (2024). Closing the Digital Divide: A Study on Improving Lives MSMEs Through Digital Literacy. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1788–1795. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/4290>
- Haniko, P., Sappaile, B. I., Gani, I. P., Sitopu, J. W., Junaidi, A., Sofyan, & Cahyono, D. (2023). Menjembatani Kesenjangan Digital: Memberikan Akses ke Teknologi, Pelatihan, Dukungan, dan Peluang untuk Inklusi Digital. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(05), 306–315. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i5.371>
- Ikhbaluddin, I. (2020). Strategi Pemerintah Kota Tasikmalaya Dalam Menerapkan Teknologi Informasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 2(2), 41–57. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP/article/view/2316/1130>
- Jayanthi, R., & Dinaseviani, A. (2022). Kesenjangan Digital dan Solusi yang Diterapkan di Indonesia Selama Pandemi COVID-19. *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 24(2), 187–200. <https://jkd.komdigi.go.id/index.php/iptekkom/article/view/4859/1896>
- Juanda, J., & Izzulhaq, A. (2023). Strategi Diskominfo dalam Pemerataan Jaringan Internet di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 3(2), 176–196. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v3i2.3567>
- Rabil, M., Nurwansyah, A., Setiawan, F. A., Hasan, M. R., Zahraty, W., Apriyansa, A., Kebangsaan, U., Author, C., & Online, A. (2025). Analysis of user acceptance of the EPDesKel application within the nagari government of agam regency using the EUCS method. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 7(2), 181–200. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v7i2.5806>
- Setiawan, F. A., Rezkiadi, F. S., Hardiansyah, R., Sekira, S., Fahlevvi, M., & Apriyansa, A. (2025). Integrasi big data dan sistem informasi geospasial untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. *Data Sciences Indonesia (DSI)*, 5(1), 105–118. <https://doi.org/10.47709/dsi.v5i1.6287>
- Susanti, W., Jannatuzzahra, K., Kartika, A., & Mukaromah, S. (2023). Upaya Dalam Mengurangi Kesenjangan Digital Pada Penerapan *Smart Village*. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi (SITASI)*, September, 6–7. <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.336>
- Susilawati, F. E., Yanti, R., & Erni, E. (2023). Transformasi Digital Pemerintah (Studi Kasus:

- Implementasi e-Government dan Hambatannya). *Journal Social Society*, 3(2), 80–94. <https://doi.org/10.54065/jss.3.2.2023.338>
- van Deursen, A. J. A. M., & van Dijk, J. A. G. M. (2013). The digital divide shifts to differences in usage. *New Media and Society*, 16(3), 507–526. <https://doi.org/10.1177/1461444813487959>
- van Deursen, A. J. A. M., & van Dijk, J. A. G. M. (2015). Toward a Multifaceted Model of Internet Access for Understanding Digital Divides: An Empirical Investigation. *Information Society*, 31(5), 379–391. <https://doi.org/10.1080/01972243.2015.1069770>
- van Deursen, A. J. A. M., & van Dijk, J. A. G. M. (2018). The first-level digital divide shifts from inequalities in physical access to inequalities in material access. *New Media and Society*, 21(2), 354–375. <https://doi.org/10.1177/1461444818797082>
- Vivi Isri Undayah, Andini Restu Fitriyani, Hana Maudunnajah, & Ivana Putri. (2025). Peran Dan Strategi Public Relation Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Serang Dalam Membangun Citra Instansi Daerah. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 158–166. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i1.627>
- Yang, C., Gu, M., & Albitar, K. (2024). Government in the digital age: Exploring the impact of digital transformation on governmental efficiency. *Technological Forecasting and Social Change*, 208(September), 123722. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123722>
- Zuiderwijk, A., Chen, Y. C., & Salem, F. (2021). Implications of the use of artificial intelligence in public governance: A systematic literature review and a research agenda. *Government Information Quarterly*, 38(3). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101577>

